

## Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar

*The Effect of Billboard Tax Revenue and Local Retribution on Local Revenue in Makassar City*

**Dewi Purnama\*, Muhtar Sapiri, Thanwain**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

\*Correspondent author email: dewipurnamaa04@gmail.com

Diterima: 16 Januari 2024 / Disetujui: 30 April 2024

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Publikasi Pendapatan Biaya dan Pembalasan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Biaya Bea Cukai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara Pembalasan Daerah secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, secara simultan, Publikasi Pendapatan Biaya dan Pembalasan Daerah memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi Pendapatan Biaya Bea Cukai dapat menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan PAD.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi Daerah, Makassar

**Abstract.** This study aims to analyze the impact of Revenue Publication and Regional Retribution on Local Own-Source Revenue (PAD) in Makassar City. The data utilized were obtained from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Makassar City. The analysis method employed was multiple linear regression using SPSS version 25. The results indicate that Revenue from Customs Duties significantly influences Local Own-Source Revenue, while Regional Retribution does not fundamentally affect it. However, simultaneously, Revenue Publication and Regional Retribution have a significant impact on Local Own-Source Revenue in Makassar City. These findings highlight that optimizing Revenue from Customs Duties could serve as a key strategy to enhance PAD.

**Keywords:** Local Revenue, Billboard Tax Revenue, Local Retribution, Makassar



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### A. PENDAHULUAN

Perbaikan masyarakat Indonesia berarti memahami budaya Indonesia yang adil dan makmur melalui perluasan pandangan hidup, pengetahuan dan bantuan pemerintah secara mengejutkan dalam rangka memahami tujuan dari pergantian masyarakat. Untuk bekerja dengan pergantian acara publik, penting untuk menggunakan aset mulai dari pendapatan negara, untuk menjadi pemilahan tugas daerah tertentu. Pemilahan tugas provinsi merupakan tanda komitmen dan tugas warga negara untuk secara lugas dan gotong royong melakukan komitmen biaya yang diharapkan untuk mendanai Negara dan Perputaran Masyarakat. Pelaksanaan Peraturan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disinggung Peraturan Pemerintah Provinsi) dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 tentang Keserasian Moneter antara Negara Pusat dan Daerah (selanjutnya disinggung Peraturan Keseimbangan Moneter) telah menimbulkan perubahan yang mendasar berkenaan dengan pedoman pusat dan daerah, khususnya penyelenggaraan pemerintahan dan dampak moneter. Masa yang tak dipungkiri pergeseran ini disebut juga kemerdekaan teritorial. Agar Indonesia memiliki otonomi daerah, setiap kota atau daerah harus dapat merencanakan sumber pendapatannya sendiri. Secara finansial, kemandirian ini diharapkan mampu menciptakan keamanan finansial dan mencapai efektivitas dalam pelaksanaan finansial dengan anggapan bahwa kemajuan di bidang tersebut akan lebih cepat dan lebih konservatif bila dilakukan oleh SDM di daerah sebenarnya. Tatanan kemerdekaan lokal memberikan

pintu terbuka bagi negara bagian provinsi untuk menangani aset normal mereka secara sungguh-sungguh dan produktif.

Kata 'biaya' berasal dari bahasa Latin 'taxo' yang berarti biaya wajib yang dibayarkan oleh individu untuk melayani otoritas publik dan kepentingan daerah itu sendiri. Sebagaimana diindikasikan oleh Peraturan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, "Pengeluaran adalah kewajiban kepada negara yang terhutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak dibayar secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara yang sebesar-besarnya". " orang yang berkembang.. Sedangkan orang-orang atau unsur-unsur, termasuk warga negara, pemungut biaya, dan pemungut biaya, yang memiliki keistimewaan dan kewajiban beban sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman tugas adalah arti penting warga negara yang ditunjukkan oleh Peraturan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2. Biaya menjadi salah satu alat dalam sirkulasi yang setara dari mata air gaji aset perbaikan negara atau gaji penduduk. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pajak dapat dikenakan pada berbagai macam hal, seperti pendapatan individu (seperti gaji, dividen, bunga), keuntungan perusahaan, penjualan barang dan jasa (pajak penjualan), kepemilikan properti (pajak properti), warisan (pajak warisan), dan masih banyak lagi. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memungut pajak, pemerintah dapat mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan mendukung pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi kesenjangan ekonomi, mendorong investasi, dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi lainnya.

Pengeluaran Provinsi adalah komitmen wajib terhadap daerah yang dimiliki orang atau unsur yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan tanpa penghargaan langsung dan digunakan untuk kebutuhan wilayah bagi orang-orang yang berkembang dengan sebaik-baiknya. Pajak atau kontribusi wajib dari penduduk setempat kepada pemerintah daerah akan melayani pemerintah dan kepentingan umum daerah tersebut. Membangun jalan dan perancah, membuat posisi baru, dan kepentingan pemerintah dan perbaikan lainnya adalah modelnya. Makna Biaya Sosialisasi Ditinjau dari Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tugas Wilayah Bagian I Pasal 1 Angka 16 dan 17 Tugas Sosialisasi adalah kewajiban untuk mengadakan pemberitahuan. "Billboard merupakan salah satu bentuk komunikasi non personal dengan tujuan menjual produk atau jasa dan mengajak pelanggan untuk membeli produk yang dijual dan membayar berbagai media yang mereka gunakan, menurut Kriyanto. Salah satu bentuk komunikasi non-pribadi adalah iklan billboard.." Sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000, bea teritorial adalah tol provinsi sebagai cicilan untuk pemerintahan tertentu atau memungkinkan diberikan secara tegas maupun diberikan oleh pemerintah lingkungan untuk menghidupi orang atau unsur. Tugas provinsi seharusnya menjadi salah satu sumber dukungan untuk administrasi dan pergantian wilayah, rezim/daerah perkotaan ditawarkan kesempatan untuk menyelidiki kemungkinan sumber keuangan, Kemandirian lokal dapat menyebabkan daerah memiliki keahlian yang lebih menonjol dalam menangani masalah keluarganya. Akibatnya, Pemerintah Daerah harus mengumpulkan pajak dan retribusi daerah dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Selain itu, legislatif lokal selalu diharapkan dapat memberikan konsekuensi dari pendapatan belanja daerah dan tugas provinsi untuk mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, dan tidak memihak. Sehingga untuk melaksanakan kemandirian daerah, otoritas publik harus memiliki pilihan untuk membedakan daerah-daerah yang dipandang potensial sebagai pendorong pergantian peristiwa provinsi, khususnya melalui upaya membangun potensi Unique Income (Cushion) Teritorial. dimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah memungkinkan daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh pada BAPENDA Kota Makassar bahwa sebelum covid data penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp .7.229.779.191 Milyar di bulan January dan pada bulan Maret tepatnya pademi covid terjadi penerimaan pajak reklame menurun hingga Rp. 1.989.853.246. Namun pada tahun 2022 di bulan January atau tepatnya setelah covid penerimaan Pajak Reklame mulai mengalami kenaikan sebesar Rp 5.675.447.493 Miliyar dan pada puncaknya di bulan Desember 2022 penerimaan Pajak Reklame mencapai Rp. 11.180.141.777 Miliyar. hal ini menggambarkan bahwa sebelum dan sesudah covid penerimaan pajak reklame sangat berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Publikasi Pendapatan Biaya dan Pembalasan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

## B. METODE PENELITIAN

Data sekunder digunakan dalam proyek penelitian kuantitatif ini. Informasi pilihan adalah informasi yang berupa angka-angka dan diperoleh dari informasi yang baru ditangani sebagai catatan atau laporan yang disusun berkaitan dengan objek pemeriksaan, khusus berupa kuitansi bea buletin, bea wilayah dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Provinsi (Dinas Pendapatan Daerah). Kota Makassar (BAPENDA) Waktu eksplorasi dimulai dari Juni hingga Juli 2023. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan model regresi linier berganda dan sampel data bulanan dari tahun 2018 hingga 2022.

Sebelum penataan Administrasi Pendapatan Metropolitan di tingkat Makassar, administrasi pasar, administrasi air minum, dan administrasi pendapatan provinsi dibentuk berdasarkan Deklarasi Kepala Balaikota Madya No. 115 administrasi dan sub-administrasi kendaraan bermotor nonmekanis. bantuan manajerial. Dengan pilihan Ketua Daerah Tingkat II Ujung Padang tentang Pembinaan Administrasi Pendapatan Propinsi Kabupaten Ujung Padang, telah dilakukan penyempurnaan nama dan perbedaan nama tidak ditetapkan menjadi Administrasi Pendapatan Daerah yang kemudian menjadi satuan. yang menangani aset keugan daerah, misalnya administrasi pengeluaran, administrasi pasar dan penjualan ikan sub-administrasi dan sub-administrasi di unit pembayaran kabupaten yang penting untuk unit pendapatan provinsi dikonsolidasikan dan diingat untuk unit kerja tentang kemampuan sebagai bantuan bagi Usaha Pemerintah di bidang moneter yaitu kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Perkada Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Rancangan Hirarki, Kewajiban dan Tata Kerja serta Tata Kerja Organisasi Pendapatan Provinsi.

Visi Organisasi Pendapatan Kota Makassar "Organisasi Pendapatan, sangat membantu dan dominan dalam pendapatan provinsi para eksekutif". Misi Dinas Pendapaan Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- Selidiki sumber Cushion dengan cara yang paling ideal
- Pengembangan lebih lanjut Bantal kerangka papan
- Kembangkan Koordinasi lebih lanjut
- Penyusunan/perubahan pedoman wilayah.
- meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### a) Regresi Linear Berganda

Berikut adalah tabel hasil persamaan regresi linear berganda:

**Tabel 1.** Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	59682441114.979	7131888113.161		8.368	.000
X1 Pajak Reklame	5.562	2.126	.455	2.616	.011
X2 Retribusi Daerah	.224	18.019	.002	.012	.990

Sumber: Data Primer Diolah 2023

Dari akibat uji beda lurus relaps pada tabel 1 di atas, resep kondisi dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 59682441114.979 + 5.562X1 + 0.224 + \varepsilon$$

Nilai tetapnya adalah 59682441114.979, artinya jika Penerimaan Bea Masuk Promosi (X1) dan Balas Dendam Propinsi (X2) bernilai 0, maka Pendapatan Unik Lingkungan (Y) bernilai 59682441114.979. Variabel Pajak Reklame (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 5,562 yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Y) akan naik atau naik sebesar Rp apabila variabel independen lainnya bernilai tetap dan Pajak Reklame bertambah sebesar satu satuan. 5.562. Fakta bahwa koefisien regresi variabel retribusi daerah (X2) sebesar 0,224 menunjukkan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) akan naik atau turun sebesar Rp jika variabel bebas lainnya bernilai tetap dan variabel

retribusi daerah (X2) bertambah satu satuan. 0,224. Koefisien bernilai positif berarti ada hubungan positif antara Bea Daerah (X2) dengan Pendapatan Unik Wilayah (Y). Semakin tinggi beban lokal, semakin tinggi nilai gaji unik teritorial.

b) Uji t Statistik

1). Penerimaan Pajak Reklame

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa  $df = /2: n-k-1 = 0.05/2 : ( 60-2-1) = 0.025 : 57$  dimana t tabel adalah 2.002. Sementara itu, nilai t hitung dari hasil regresi pada tabel 4.1 adalah sebesar 2,616, atau t hitung (2,616) > t tabel (2,002). Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

2). Retribusi Daerah

Dilihat dari hasil estimasi didapatkan  $df = \alpha/2 : ( n-k-1) = 0.05/2 : ( 60-2-1) = 0.025 : 57$  dimana nilai t tabel adalah 2.002. Sementara itu, dari hasil relaps dari tabel 4.1, nilai t hitung adalah 0,012 atau t hitung (0,012) < t tabel (2,002) sehingga dari hasil uji t sangat mungkin beralasan balas dendam provinsi tidak secara mendasar mempengaruhi pendapatan masyarakat dalam kerangka berpikir tersebut pada tahun 2018 - 2022.

c) Uji F Statistik

Uji F terukur menunjukkan hubungan faktor-faktor otonom dalam model relaps apakah mereka secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F tabel adalah 3,16 karena derajat kebebasan penyebut (dfd) = (n-k-1) = (60-2-1) = 57 dan derajat kebebasan pembilang (dfn) = (k) = (2) dihitung. Berikutnya adalah efek samping dari uji F terukur:

**Tabel 2.** Uji F Statistik

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8881146294303535000000.000	2	4440573147151767400000.000	7.515	.001b
Residual	33679428031188337000000.000	57	590867158441900600000.000		
Total	42560574325491870000000.000	59			

Sumber: Data Primer Diolah 2023

Dilihat dari hasil uji F terukur pada Tabel 2 dengan arti 5%, terlihat bahwa nilai F pengukuran adalah 7,515 > F tabel 3.16 dengan tingkat kepentingan F ditentukan sebesar 0,001 yang menunjukkan nilai kepentingan F ditentukan lebih sederhana dari tingkat kepentingan 5%. Artinya, cenderung diasumsikan bahwa secara bersama-sama (sementara) faktor Pendapatan Pengeluaran Promosi dan Pembalasan Propinsi berdampak pada Pendapatan Unik Teritorial.

d) Uji Koefisien Determinasi

Berikutnya adalah konsekuensi pengujian koefisien jaminan:

**Tabel 3.** Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.457a	.209	.181	24307759222.97036

Sumber: Data Primer Diolah 2023

**Pembahasan**

a) Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah\*\*

Koefisien regresi penerimaan pajak reklame sebesar 5,52 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% penerimaan pajak reklame dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar sebesar 5,52%. Koefisien positif ini mencerminkan hubungan positif antara pajak reklame dan PAD, sehingga ketika pajak reklame meningkat, PAD juga akan bertambah. Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 4.5, nilai t hitung sebesar 2,616 lebih besar dari t tabel sebesar 2,002, dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Makassar pada tahun 2018–2022.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Muhammad Iqbal dan Azizah Olvicka Mayoda (2023), yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Peningkatan aktivitas bisnis, termasuk pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dan restoran cepat saji di Kota Makassar, telah meningkatkan kebutuhan akan reklame sebagai alat promosi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya reklame dalam memasarkan produk turut mendorong kontribusi pajak

reklame terhadap PAD. Pajak reklame memberikan dampak signifikan karena penerimaan pajak reklame cenderung mencapai target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak reklame berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap PAD. Selain itu, meningkatnya aktivitas promosi dari berbagai sektor usaha juga mendukung peningkatan penerimaan pajak reklame di Kota Makassar. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame, seperti potensi penghindaran pajak dan perlunya pengawasan lebih intensif dari pihak terkait. Pengelolaan yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga kontribusi pajak reklame terhadap PAD dapat lebih maksimal.

b) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil regresi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa retribusi daerah memengaruhi pendapatan daerah. Sebagai perbandingan, Freeman (1984) menyatakan bahwa keberhasilan retribusi daerah bergantung pada pengelolaan yang melibatkan pemangku kepentingan, yang mampu memengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.

Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa retribusi daerah berperan sebagai komitmen masyarakat terhadap kontribusi pendapatan daerah, yang pada akhirnya digunakan untuk mendukung pembangunan publik. Namun, dalam penelitian ini, lemahnya kontribusi retribusi daerah disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan pengelolaan retribusi yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah sulit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lakoy (2016) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki dampak signifikan terhadap PAD di beberapa wilayah. Sebaliknya, penelitian Iqbal dan Sunardika (2015) menemukan bahwa dalam batas tertentu, retribusi daerah dapat berkontribusi terhadap PAD, meskipun hasilnya tidak selalu konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pengawasan yang lebih baik dan transparansi dalam pengelolaan dana retribusi juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c) Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis regresi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Makassar. Nilai F hitung sebesar 7,515 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,16, dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Yulia Komala dan Rahmawaty Ariaiani (2021), yang menyatakan bahwa penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah memiliki pengaruh simultan terhadap PAD. Kontribusi bersama ini menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut saling melengkapi dalam mendukung pendapatan daerah. Namun, keberhasilan kontribusi ini sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif dan transparan. Optimalisasi pajak reklame dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan penyesuaian tarif pajak yang sesuai dengan perkembangan bisnis. Sementara itu, pengelolaan retribusi daerah memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas yang mendukung administrasi retribusi. Dengan langkah-langkah tersebut, kontribusi pajak reklame dan retribusi daerah terhadap PAD dapat lebih maksimal. Namun, tantangan yang muncul seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap retribusi daerah dan potensi penghindaran pajak perlu diatasi dengan edukasi dan pendekatan yang lebih baik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan dari kedua sumber pendapatan ini.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun 2018–2022, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t hitung (2,616) yang lebih besar dari t tabel (2,002) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar disarankan untuk terus

mengoptimalkan penerimaan pajak reklame melalui peninjauan kebijakan tarif dan struktur pajak agar sesuai dengan kondisi pasar, tanpa menghambat pertumbuhan industri periklanan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pajak reklame perlu diperkuat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, mengingat retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan meninjau objek retribusi yang ada untuk mengidentifikasi potensi baru, sambil memastikan kualitas layanan atau fasilitas yang menjadi objek retribusi ditingkatkan agar dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mendukung peningkatan PAD Kota Makassar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, I.M.R., Elim, I., and Pusung, R.J. (2021). Kajian Tugas Mempromosikan dan Komitmennya Terhadap Unique Income Daerah Minahasa Utara. 9(1), 608–617, Jurnal EMBA.
- Didin Wahyudin. 2(1), 1–8. Djoko Muljono, 2009, Pembukuan Tugas, Versi Dirombak 2009, Andy Mendistribusikan, Yogyakarta
- Frameworks, P., Pengakuan, I., dan Publikasi, P. (2021). Al-Muqayyad. 84–97.
- Kristaen, Yvonne, dan Augustine R. 2013. “Pendekatan Eksplorasi Bisnis dan Pembukuan.” Pembukuan, P.S. (2017). DPRD Provinsi BANDUNG BARAT PERIODE 2013 - 2017 Heriyanto
- Mia Sukmawati dan Jouzar Farouq Ishak. (2016). Dampak Sosialisasi Komitmen Kajian dan Retribusi Kafe terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. 10(1), halaman 1056–1068 dalam Prosiding Lokakarya Penelitian Industri dan Seminar Nasional. <https://jurnal.polban.ac.id/continuing/article/view/1464>
- Musdalifah, S., Ernitawati, Y., Ikhwan, S., Pembukuan, S., Para Pelaksana, P.S., Café, P., dan Announcement, P. (2020). Tarif Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Sehubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. Buku Harian Pembukuan dan Uang (JACFIN), 1(1), 37-51. Pad, D., dan Kota, David I. INDEPENDENT: E-ISSN: Journal of Economics 2798-5008. 2, 60–68. Undang-undang Tidak Resmi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Moneter Wilayah.
- Pajak dan retribusi daerah menjadi subyek Perubahan Nomor 28 Tahun 2009 atas Undang-Undan Nomor 34 Republik Indonesia yang diundangkan pada tahun 2000.
- Rustam, A., Makassar, U.M., Makassar, U.M., Jam, A., Makassar, U.M., and Makassar, U.M. (2021). Kelangsungan Mempublikasikan Berbagai-macam Tugas Terhadap. 4 (Nov.), hlm. 278 286,
- Sripadita, Nio Anggun, dkk. 2014. Kajian Kelayakan Publikasi Penerimaan Pengeluaran Dalam Upaya Kenaikan Gaji Unik Provinsi (Analisis Kontekstual Pada Administrasi Pendapatan Perda Kediri). Jurnal E-Taxation Edisi Pertama 2014 Universitas Brawijaya Jawa Timur ada di Malang.
- Sugiyono (2012). Metode Penelitian Bisnis Abjad: Bandung.
- Sugiyono (2017). Strategi Eksplorasi Kuantitatif, Subjektif, dan Penelitian dan pengembangan. Bandung: Alfabeta, CV.